

sejak awal kemunculan pandemi pemerintah telah menyiapkan serangkaian program penanganan dengan cepat. Baik dari sisi distribusi maupun ketersediaannya.

Salah satu kebijakan strategis yang dilakukan Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan, yaitu mendorong penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama di saat menghadapi pandemi Covid-19. CPPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi keadaan darurat, kekurangan pangan, kerawanan pangan, bencana alam/sosial serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional.

Langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan wujud implementasi pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU Pangan 18/2012 dan PP 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi serta tindaklanjut nyata atas Inmendagri nomor 2/2020 tentang Menjaga Ketahanan Pangan Nasional saat tanggap darurat Covid 19.

Terkait dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah maka Dinas Pangan Lima Puluh Kota menggunakan persediaan cadangan pangan sebagai bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19. Rekapitulasi bantuan pangan dapat dilihat pada tabel berikut :

BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP I			
NO	KECAMATAN	ANGGOTA KELUARGA (ORANG)	JUMLAH BANTUAN (KG)
1	Luak	11	46,2
2	Akabiluru	5	21,0
3	Lareh Sago Halaban	5	21,0
4	Bukik Barisan	5	21,0
5	Harau	12	50,4
JUMLAH			159,60
BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP II			
6	Luak	12	50,4
7	Guguak	9	37,8
8	Mungka	4	16,8
9	Bukik Barisan	1	4,20
10	Harau	5	21,0
11	Situjuah Limo Nagari	10	42,0
12	Suliki	3	12,6
13	Kapur IX	19	79,80

14	Pangkalan	7	29,4
JUMLAH			294,0
BANTUAN CADANGAN PANGAN TAHAP III			
15	Luak	12	50,4
16	Guguak	11	37,8
17	Suliki	4	16,8
18	Harau	1	4,20
19	Situjuah Limo Nagari	5	21,0
20	Akabiluru	10	42,0
21	Kapur IX	3	12,6
22	Pangkalan	30	126
JUMLAH			588,0

Tabel 19. Rekapitulasi bantuan pangan

Ket:

Rumus : $300 \text{ gr} \times 14 \text{ hari} \times \text{jiwa}$

1. 300 gr = Ketersediaan bahan pangan (beras)/hari/orang menurut skor PPH
2. 14 hari = lama isolasi berdasarkan Perbup No 72 Tahun 2020 tentang Bantuan Pangan bagi Masyarakat yang di isolasi akibat Pandemi Covid 19

Salah satu indikator terbangunnya ketahanan pangan indikasi kerawanan pangan. Salah satu aspek penting dalam pencapaian tersebut adalah ketersediaan cadangan pangan dan kemampuannya dalam mendayagunakan sumber daya pangan yang ada. Pengembangan cadangan pangan baik di tingkat rumah tangga maupun wilayah dinilai strategis dalam rangka mengatasi resiko situasi yang tidak normal. Pengelolaan stok secara bijak di tingkat rumah tangga, masyarakat, pemerintah daerah, merupakan salah satu kunci tercapainya ketahanan pangan

Cadangan pangan merupakan suatu kebutuhan yang diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan pangannya setiap saat. Pasokan yang stabil dari waktu ke waktu dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sebaiknya dilakukan secara mandiri serta sesuai dengan kemampuan masyarakat itu sendiri, terutama untuk mengatasi kekurangan pangan, kelebihan pangan dan atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang mengakibatkan terjadinya rawan pangan.

Pengadaan cadangan pangan pemerintah diutamakan melalui pembelian pangan pokok tertentu produksi dalam negeri berdasarkan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah dan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Perum Bulog. Pengelolaan cadangan pangan

pemerintah dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah baik jumlah maupun mutunya antar daerah dan antar waktu. Penyaluran cadangan pangan pemerintah dilakukan untuk menanggulangi : (1) kekurangan pangan, (2) gejolak harga pangan, (3) bencana alam, (4) bencana sosial, dan / atau (5) keadaan darurat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = Input Target/Input Aktual ≥ 1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	47 Ton	28,436 ton	60,5%	337.425.000	332.765.803	98,61%
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		60,5%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		98,61%
Tingkat Efisiensi =			0,61 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 20. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Jumlah Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan/ meningkatkan anggaran agar mencapai target yang dibutuhkan, karena hal yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja adalah dana yang dibutuhkan tidak tersedia.

2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

a. Indikator Kinerja 3 : Persentase Kecamatan kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikator SKPG (aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan)

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ke t
1.	Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG 1.aspek ketersediaan 2.aspek akses pangan 3.aspek pemanfaatan pangan	1.	a.23% b.23% c. 61%	a.0% b.0% c. 53,84%	a.15% b.15% c.53%	a. 23,07% b. 0 c. 69,23%	

Tabel 21. Rekapitulasi bantuan pangan

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi masing-masing aspek ada dibawah target yang ditetapkan dimana artinya semakin sedikit daerah rawan pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

kerawanan pangan dapat diartikan sebagai kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat. Keadaan rawan pangan

dapat dilihat dari kondisi daerah/wilayah atau rumah tangga yang terganggu ketersediaan pangannya, dan kondisi lain pada masyarakat atau keluarga yang terganggu kemampuan aksesnya terhadap pangan tersebut.

Penanganan Daerah Rawan Pangan merupakan upaya untuk menangani suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Untuk penanganan daerah rawan pangan dilakukan beberapa tahap kegiatan yaitu :

1. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi merupakan serangkaian proses untuk mengantisipasi kejadian kerawanan pangan dan gizi melalui pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, analisis, dan penyebaran informasi situasi pangan dan gizi, yang pedomannya diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/OT.140/7/2010.

Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) diawali dengan pelaksanaan kegiatan pengamatan situasi pangan, dengan teknik penyediaan data/informasi terhadap penanganan masalah gangguan pangan yang berpotensi muncul setiap saat.

Analisis data SKPG terdiri dari analisis data bulanan dan tahunan pada tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan. Analisis data SKPG bulanan ditunjukkan dengan nilai persentase ketersediaan pangan bulan berjalan dibandingkan dengan rata-rata data tersebut dalam lima tahun terakhir pada luas tanam dan luas puso, serta diperkuat dengan analisis data luas panen dan cadangan pangan pada komoditas pangan utama seperti padi, ubi kayu, ubi jalar, dan jagung. Analisis data akses pangan bulanan ditunjukkan dengan membandingkan harga pada bulan berjalan dengan rata-rata data harga tiga bulan terakhir pada komoditas pangan utama dan strategis seperti beras, jagung, ubi kayu, ubi jalar, gula, minyak goreng, daging ayam, dan telur. Analisis data pemanfaatan pangan bulanan dapat ditunjukkan oleh status gizi balita dengan menghitung angka balita naik berat badan, angka balita yang tidak naik berat badan dalam dua kali penimbangan berturut-turut, dan angka balita dengan berat badan di bawah garis merah dibandingkan angka balita yang ditimbang pada bulan tersebut.

Untuk menghitung persentase Kecamatan rawan pangan dapat dilihat dari beberapa aspek berikut :

A. Ketersediaan Pangan

Aspek ketersediaan (Food Availability) yaitu ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Ketersediaan pangan ini diharapkan mampu mencukupi pangan yang didefinisikan sebagai jumlah kalori yang dibutuhkan untuk kehidupan yang aktif dan sehat.

Untuk melihat aspek ketersediaan pangan kita menggunakan data produksi (luas tanam, luas panen, luas puso), data konsumsi pangan, data jumlah penduduk dan cadangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Waspada	Aman	Aman	Rawan	Aman	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
2	AKABILURU	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan
3	LUAK	Rawan	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
4	LAREH SAGO HALABAN	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Aman	Waspada	Aman	Aman	Waspada
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
6	HARAU	Waspada	Aman	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Aman	Waspada
7	GUGUAK	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada							
8	MUNGKA	Waspada	Rawan	Waspada										
9	SULIKI	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
10	BUKIK BARISAN	Waspada	Aman	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Aman	Waspada	Aman	Rawan	Rawan	Waspada
11	GUNUANG OMEH	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan	Waspada	Waspada	Aman	Waspada	Waspada	Waspada	Waspada
12	KAPUR IX	Rawan	Rawan	Aman	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan
13	PANGKALAN	Waspada	Rawan	Rawan	Waspada	Rawan	Waspada	Rawan	Rawan	Rawan	Rawan	Waspada	Waspada	Rawan

KETERANGAN

	Aman
	Waspada
	Rawan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Ketersediaan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% \\ \frac{3}{13} \times 100\% = 23,07$$

Pada komposit aspek ketersediaan pangan tidak ada kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status aman. Hal ini disebabkan karena persentase luas tanam bulan berjalan lebih rendah dibanding rata – rata luas tanam 5 tahun sebelumnya. Bobot yang diperlukan untuk mencapai status aman luas tanam adalah >5. Sedang kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuh Limo Nagari, Harau, Guguk, Mungka, Suliki, Bukik Barisan dan Gunuang Omeh berada pada status waspada akan ketersediaan pangan dengan bobot 2 dengan analisis perhitungannya ≤ -5 sampai < 5 . Kecamatan akabiluru, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru berada pada status rawan karena memiliki bobot persentase luas tanam bulan berjalan dibanding rata – rata 5 tahun sebelumnya 3 dengan analisis < -5 .

Berkurangnya luas tanam disebabkan karena meningkatnya lahan pemukiman masyarakat berkaitan dengan masalah sosial dan meningkatnya lahan tidak produktif. Dari 13 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota kurang membudidayakan tanaman palawija seperti jagung, ubi kayu dan ubi jalar.

Komposit Ketersediaan pangan juga dipengaruhi luas puso. Puso adalah gagal panen yang disebabkan karena serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) baik itu berupa hama maupun penyakit. Puso juga disebabkan karena iklim, cuaca maupun bencana alam.

B. Akses Pangan

Aspek Akses Pangan (Food Akses) yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya yang dimiliki untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dari individu terdiri dari akses ekonomi, fisik dan sosial. Akses ekonomi tergantung pada pendapatan, kesempatan kerja, dan harga.

Akses fisik menyangkut tingkat tingkat isolasi daerah (sarana dan prasarana distribusi), sedangkan akses sosial menyangkut tentang referensi pangan atau dapat dikatakan keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan

pangan pada tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga memperoleh pangan yang dapat diukur dari pemilikan lahan. Cara memperoleh pangan juga dapat dengan memperoleh produksi sendiri dan membeli.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Akses Pangan dapat dikategorikan dalam faktor-faktor yang bersifat fisik antara lain kelancaran sistem distribusi, terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi sehingga tidak menimbulkan terjadinya isolasi daerah. Faktor yang bersifat ekonomi antara lain kemampuan atau peningkatan daya beli masyarakat atau individu karena adanya kesempatan kerja menyebabkan pendapatan tinggi sehingga harga pangan terjangkau. Faktor yang bersifat sosial antara lain tidak adanya konflik sosial yang disebabkan oleh buruknya adat atau kebiasaan, tinggi rendahnya pengetahuan sehingga berpengaruh pada preferensi atau pemilihan jenis pangan. Suatu contoh adanya pengetahuan tentang asupan gizi pada komoditas pangan yang seharusnya dikonsumsi maka rumah tangga atau individu dengan pendapatan yang tinggi maka tidak mustahil rumah tangga/individu akan memilih komoditas pangan yang memiliki mutu dan kualitas.

Untuk melihat aspek Akses pangan kita menggunakan data Harga pangan. Dari data yang diolah didapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK AKSES PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH													
2	AKABILURU													
3	LUAK													
4	LAREH SAGO HALABAN													
5	SITUJUAH LIMO NAGARI													
6	HARAU													
7	GUGUAK													
8	MUNGKA													
9	SULIKI													
10	BUKIK BARISAN													
11	GUNUANG OMEH													
12	KAPUR IX													
13	PANGKALAN													

- KETERANGAN**
- Aman
 - Waspada
 - Rawan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Akses Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% \\ \frac{0}{13} \times 100\% = 0$$

Dari aspek akses pangan tidak ada Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status rawan. Pada komposit akses pangan Kecamatan Kapur IX berada pada status waspada dan mendapatkan bobot 2 dengan analisis 5 sampai ≤ 20 pada komoditi beras kualitas sedang dan komoditi lain ≤ 15 . Pada bulan maret, april dan mei terjadi lonjakan harga pada beberapa kecamatan disebabkan karena Indonesia mengalami pandemi Covid -19 yang menyebabkan berkurangnya akses ke beberapa wilayah dan meningkatkan harga pangan. selain itu bulan april dan mei merupakan persiapan menghadapi bulan suci ramadhan.

C. Pemanfaatan Pangan

Aspek Pemanfaatan Pangan (Food Utilization) yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan. Efektifitas dari pemanfaatan pangan tergantung pada pengetahuan rumah tangga/individu sanitasi dan ketersediaan air, fasilitas kesehatan, serta penyuluhan gizi dan pemeliharaan balita.

Pemanfaatan pangan/konsumsi terkait dengan kualitas dan keamanan jenis pangan yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan gizi. Ukuran kualitas pangan seperti ini sulit dilakukan karena melibatkan berbagai jenis makanan dengan kandungan gizi yang berbeda-beda, sehingga ukuran keamanan hanya dilihat dari ada atau tidaknya bahan makanan yang mengandung protein hewani dan/atau nabati yang dikonsumsi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, ukuran kualitas pangan dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan (lauk pauk) sehari-hari yang mengandung protein hewani dan nabati. Pemanfaatan Pangan erat kaitannya dengan mutu dan keamanan pangan. Mutu dan keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan manusia, tetapi juga terhadap produktivitas ekonomi dan perkembangan sosial baik individu, masyarakat maupun negara. Selain itu mutu dan keamanan pangan terkait erat juga dengan kualitas pangan yang dikonsumsi, yang secara langsung berpengaruh terhadap kualitas kesehatan serta pertumbuhan fisik dan intelgensi manusia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pangan antara lain fasilitas dan layanan kesehatan dengan cara peningkatan fasilitas kesehatan yang memadai dan mempermudah layanan kesehatan, sanitasi dan ketersediaan air

dengan kecukupan air bersih hal ini dikarenakan air yang kurang bersih rentan penyakit. Faktor lain yang berpengaruh terhadap penyerapan pangan yaitu pengetahuan ibu rumah tangga yang mana polamakan dan pola asuh kesehatan berdampak pada seberapa besar jumlah asupan gizi yang dikonsumsi. Apabila faktor-faktor tersebut terpenuhi tidaklah mustahil bahwasanya hasil yang diharapkan seperti peluang harapan hidup dari terpenuhinya gizi balita akan meminimalkan angka kematian bayi sebagai penerus generasi. Dari beberapa hasil observasi penyerapan pangan, bentuk dari ketahanan pangan menitik beratkan pada pola konsumsi yang diharapkan mampu memenuhi gizi maupun energi, diversifikasi pangan dan adanya jaminan keamanan pangan.

Untuk melihat aspek pemanfaatan pangan kita menggunakan data Status gizi buruk dan Kasus Gizi Buruk. Dari data yang diolah di dapatkan daerah yang rawan selama satu tahun yaitu sebagai berikut :

REKAP WARNA PETA TAHUN 2020														
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN														
NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES	KOMPOSIT
1	PAYAKUMBUH	Green	Green	Green	Red	Red	White	Green						
2	AKABILURU	Red	Red	Red	Red	Green	White	Red						
3	LUAK	Red	Green	Red	White	White	White	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
4	LAREH SAGO HALABAN	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Green	Green	Green	Red	Red
5	SITUJUAH LIMO NAGARI	Green	Red	Red	White	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Green	Red	Red
6	HARAU	Green	Green	Green	Red	Red	Red	Green						
7	GUGUAK	Green	Green	Yellow	Green									
8	MUNGKA	Green	Green	Green	Red	White	White	Green						
9	SULIKI	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
10	BUKIK BARISAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red
11	GUNUANG OMEH	Red	Red	Red	Red	Red	White	Green	Red	Green	Green	Red	Green	Red
12	KAPUR IX	Red	Red	Red	Red	White	White	Red	Red	Red	Red	Green	Green	Red
13	PANGKALAN	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Green	Red	Red	Red	Red	Red	Red

KETERANGAN	
Green	Aman
Yellow	Waspada
Red	Rawan
White	Tidak ada penimbangan

Dari peta diatas dapat kita hitung persentase daerah rawan pangan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Kec. Dengan Pemanfaatan Pangan yang rawan Pangan}}{\text{Jumlah Kecamatan yang Ada}} \times 100\% = \frac{9}{13} \times 100\% = 69,23\%$$

Pada aspek pemanfaatan pangan beberapa kecamatan berada pada status rawan disebabkan karena beberapa faktor. Indikator yang dijadikan tolak ukur pada aspek pemanfaatan pangan ini adalah

- N/D (Jumlah Balita naik Berat Badan/Jumlah balita ditimbang
>90 =1 Aman
80 sampai \leq 90 = 2 waspada
< 80= 3 rawan
- BGM/D (Jumlah Balita dibawah Garis Merah/ Jumlah balita ditimbang
< 5= 1 Aman
5 sampai \leq 10 =2 waspada
>10=3 rawan
- 2T/D (Jumlah Balita tidak naik berat badan 2 kali penimbangan/ Jumlah balita ditimbang
< 10= 1 Aman
10 sampai \leq 20= 2 waspada
>20= 3 rawan

Yang menjadi permasalahan pada aspek pemanfaatan pangan adalah N/D. Pada umumnya yang menyebabkan beberapa Kecamatan berada pada status rawan adalah standar N/D >90. Pada BGM dan 2T/D berada pada status aman.

2. Investigasi

Investigasi dilaksanakan sebagai tindak lanjut hasil analisis SKPG yang direkomendasikan Pokja Pangan dan Gizi kepada Ketua DKP melalui Badan/Dinas/Kantor/unit kerja ketahanan pangan di provinsi dan kabupaten/kota maupun laporan yang diterima mengenai kondisi rawan pangan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. Investigasi dilakukan untuk mengetahui: (1) akibat kejadian bencana pada ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah yang masyarakatnya tidak mampu mengatasinya tanpa bantuan dari pihak lain; (2) tipe bantuan/intervensi yang diperlukan; (3) sasaran penerima manfaat; (4) besaran bantuan; (5) waktu pelaksanaan intervensi; (6) letak lokasi sasaran; (7) mekanisme intervensi; dan (8) upaya penanganan melalui bantuan pemerintah, badan usaha, swasta nasional, atau internasional.

3. Intervensi

Hasil investigasi dijadikan sebagai bahan rekomendasi untuk menetapkan jenis intervensi yang akan diambil untuk menanggulangi kerawanan pangan, sesuai dengan kondisi di lapangan. Sebelum intervensi dilakukan, terlebih dahulu perlu ditetapkan sasaran penerima manfaat (kelompok atau rumah tangga), tipe bantuan/intervensi yang diperlukan, besaran bantuan, waktu intervensi, mekanisme, durasi, dan skala intervensi.

Intervensi yang dilakukan berdasarkan hasil penghitungan daerah rawan pangan berdasarkan tiga aspek yaitu aspek Ketersediaan Pangan, Akses Pangan dan pemanfaatan Pangan. Dari tiga aspek tersebut didapat daerah rawan pangan pada aspek Pemanfaatan Pangan oleh sebab itu intervensi tersebut di nilai dari status gizi balita. Timbulnya kasus kurang gizi terutama pada balita sebagai kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap kerawanan pangan. Kekurangan gizi pada balita dimasa sekarang jelas akan berakibat buruk terhadap generasi bangsa dimasa yang akan datang serta menunjukkan adanya kerawanan pangan di masyarakat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :

Efisiensi = $\frac{\text{Input Target}}{\text{Input Aktual}} \geq 1$

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per progam/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Resntra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Persentase Kecamatan Kategori						

rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG	1.15%					
1.aspek ketersediaan	2.15%	1.23%	1.153%	1.27.125.300	1.24.637.727	1.90,83
2.aspek akses pangan	3.53%	2.0	2.0	2.27.125.300	2.24.637.727	2.90,83
3.aspek pemanfaatan pangan		3.69,23	3.130%	3.27.125.300	3.24.637.727	3.90,83
Persentase rata-rata capaian kinerja			196,33	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		211,93
Tingkat Efisiensi =			0,92 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 22. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran Terwujudnya **Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat** dengan indikator Persentase Kecamatan Kategori rawan pangan berdasarkan peta komposit indikaor SKPG berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sbb :

1. Melakukan efisiensi anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran sepanjang memungkinkan.
2. Melakukan percepatan realisasi kegiatan.

b. Indikator Kinerja 4 : Jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan

N o	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan	16 nagari	11 nagari	13 nagari	14 nagari	13 Nagari	

Tabel 23. Indikator Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa adanya peningkatan jumlah lumbung yang ada di Nagari dari tahun 2020 masih sama dengan tahun lalu yaitu 13 nagari, dimana artinya tidak ada penambahan nagari yang memiliki Lumbung pada tahun 2020.

Lumbung pangan masyarakat dimaksudkan untuk mendekatkan akses pangan anggotanya. Lumbung dipandang sebagai model perangkat ketahanan pangan masyarakat desa yang cukup efektif. Akan tetapi seiring dengan masuknya model-model kelembagaan lain sistem lumbung sebagai pusat cadangan pangan, terutama di kawasan pedesaan, kini semakin sulit ditemukan. Sisa kearifan pengelolaan pangan itu terkikis oleh perubahan tuntutan hidup, dimana kepraktisan menjadi salah satu dasar perhitungan. Pemerintah baik pusat maupun daerah kembali mengaktifkan lumbung pangan di masyarakat dengan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dalam pengelolaan lumbung pangan, optimalisasi sumberdaya yang tersedia dan penguatan kapasitas kelembagaannya. Dengan pemberdayaan tersebut diharapkan dapat dikembangkan lumbung pangan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan serta dapat berperan secara optimal dalam penyediaan pangan.

Lumbung Pangan adalah tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan pangan lain untuk menghadapi masa paceklik. Kelompok Lumbung Pangan adalah kelembagaan cadangan pangan yang dibentuk oleh masyarakat desa/kota dan dikelola secara berkelompok yang bertujuan untuk pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat di suatu wilayah.

Lumbung pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Kelompok Lumbung Pangan Harapan Bersama , Jorong Parak Lubang nagari Tanjuang Gadang Kecamatan Lareh Sago Halaban
2. Kelompok Lumbung Pangan Rangkiang Simpati Jorong Simpang Tigo Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru
3. Kelompok Lumbung Pangan Makmur, Jorong Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh
4. Kelompok Lumbung Pangan Asoka, Jorong Aia Putih Nagari Sarilamak Kecamatan Harau
5. Kelompok Lumbung Pangan Bundo Kandung nagari Muaro Paiti Kecamatan Kapur IX

6. Kelompok Lumbung Pangan Karambia Sabatang, Jorong Kampuang Gadang Nagari Pandam gadang Kecamatan Gunuang Omeh
7. Kelompok Lumbung Pangan Serba Usaha, Jorong Kampuang Tengah Nagari Talang Maur Kecamatan Mungka
8. Kelompok Lumbung Pangan Amanah jorong padang bungo nagari Andiang Kecamatan Suliki
9. Kelompok Lumbung Pangan Baruah Tunggang Jorong Baruah Tunggang Nagari Kubang Kecamatan Guguk
10. Kelompok Lumbung Pangan Maju Bersama Jorong Jambak Nagari Banja Laweh Kecamatan Bukik Barisan
11. Kelompok Lumbung Pangan Suka Mandiri Jorong Banja Ranah Nagari Pangkalan Kecamatan Pangkalan Koto Baru
12. Kelompok Lumbung Pangan Saiyo Sakato Jorong Padang Balimbiang Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban
13. Kelompok Lumbung Pangan Sawah Bakir Jorong Tanjuang Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) tahap pengembangan dan tahap mandiri, dimana lumbung pangan masyarakat tahap pengembangan terdiri dari LPM Karambia Sabatang, LPM Serba Usaha Makmur, LPM Suka Mandiri, LPM Baruah Tunggang dan LPM Saiyo Sakato. Sedangkan yang termasuk kelompok lumbung pangan masyarakat tahap mandiri adalah LPM Rangkang Simpati, LPM Makmur, LPM Asoka, LPM Bundo Kandung, LPM Amanah dan LPM Maju Bersama. LPM tahap pengembangan ditujukan hanya untuk iron stok sebesar 4 ton gabah, LPM tahap pengembangan merupakan LPM yang aktif namun kekurangan modal, untuk dapat menjadi LPM tahap mandiri sehingga dengan penambahan modal diharapkan dapat menjadi LPM tahap mandiri.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengembangan lumbung pangan masyarakat perlu di upayakan untuk dapat berperan dalam pengembangan penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja utama, jumlah nagari yang memiliki sarana lumbung pangan pada tahun 2020 dengan target 14 nagari, namun lumbung pangan yang ada pada tahun 2020 ini hanya berjumlah 13 nagari dimana artinya tahun pada tahun 2020 tidak mencapai target.

Tujuan Pencapaian sasaran strategis ” Terwujudnya Kemandirian dan Keudalatan Pangan yang selaras dengan Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat” dengan Indikator Kinerja Utama jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan adalah 13 Nagari. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat Tinggi** dengan persentase 92,85%. Hal ini dilihat dari target jumlah Nagari yang memiliki Sarana Lumbung Pangan pada tahun 2020 adalah 14 Nagari, namun pencapaiannya adalah 13 Nagari. Untuk tahun 2021 ditargetkan 16 Nagari.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Secara umum tingkat efisiensi sumberdaya dapat dilihat dari aspek realisasi capaian kinerja dan realisasi penyerapan anggaran masing-masing program/kegiatan yang langsung mendukung sasaran strategis,

Adapun untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut :
Efisiensi = Input Target/Input Aktual >=1

- a. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- b. Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang daripada 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Adapun tingkat efisiensi pencapaian setiap sasaran per program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Indikator Kinerja Utama	Kinerja Tahun 2020		Persentase Capaian terhadap target	Anggaran tahun 2020		Persentase realisasi anggaran terhadap pagu DPA
	Target Renstra	Capaian		Pagu DPA (Rp)	Realisasi (Rp)	
Jumlah Nagari yang memiliki sarana Lumbung Pangan pangan	14 nagari	13 nagari	92%	48.725.000	45.755.000	93,90
Persentase rata-rata kinerja	rata-rata capaian		92%	Persentase rata-rata penyerapan anggaran		93,90%
Tingkat Efisiensi =			0,97 (efisiensi tidak tercapai)			

Tabel 24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Dokumentasi Lumbung Pangan Masyarakat



Gambar. 1 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat Sawah Bakir dan kelengkapannya



Gambar 2. LPM Harapan Bersama



Gambar 3. LPM Rangkaian Simpati



Gambar 4. LPM Makmur



gambar 5. LPM Asoka



Gambar 6. LPM Baruah Tunggang Saiyo



Gambar 7. Luah Karambia Sabatang



Gambar 8. LPM Serba Usaha Makmur



Gambar 9. LPM Amanah



Gambar 10. LPM Bundo Kandung



gambar 11. LPM Maju Bersama



Gambar 12. LPM Suka Mandiri



Gambar 13. Luah Saiyo Sakato

c. Indikator Kinerja 5 : Jumlah Nagari Mandiri Pangan

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2019	Realisasi 2019	Target 2020	Realisasi 2020	Ket
1.	Jumlah Nagari Mandiri Pangan	5 Nagari	3 nagari	4 nagari	4 nagari	4 Nagari	

Tabel 25. Indikator Jumlah Nagari Mandiri Pangan

Dilihat pada tabel diatas dari target jumlah Nagari Mandiri Pangan yang baru pada tahun 2019 adalah 3 Nagari, namun pencapaiannya adalah 4 Nagari, dimana ada satu penambahan nagari Mandiri pangan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 ini tidak ada penambahan nagari Mandiri Pangan hal ini disebabkan untuk target 2020 telah direalisasikan pada tahun 2019 namun Untuk tahun 2021 sudah ditargetkan 5 Nagari Mandiri Pangan namun karena tahun 2020 tidak terealisasi maka ditargetkan untuk tahun 2021 ada 1 nagari penambahan Nagari Mandiri Pangan.

Nagari/Desa Mandiri Pangan adalah Nagari/Desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, Sub sistem distribusi dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Nagari Mandiri Pangan merupakan salah satu strategi untuk mempercepat

pembangunan didaerah pedesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan.

Kegiatan Nagari Mandiri Pangan dilaksanakan Di Nagari/Desa yang terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan berisiko rawan pangan dan gizi, dengan dasar pemilihannya adalah FIA 2005/FSVA 2009 dan Desa Rawan Pangan dengan jumlah RTM(Rumah Tangga Miskin) lebih dari 30% dari jumlah KK berdasarkan hasil survey Data Dasar Rumah Tangga (DDRT).

Komponen kegiatan yang dilakukan, melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan, pengembangan sistem ketahanan pangan dan dukungan sarana prasarana desa melalui koordinasi lintas sektor dalam wadah dewan ketahanan pangan.

Tahun 2020 ini sudah ada 20 kelompok DMP yang terdiri dari 11 kelompok inti DMP, 6 kelompok replikasi DMP, dan 3 kelompok Nagari Mandiri Pangan (MANTAP). Keseluruhan kelompok DMP ini tersebar di 15 Nagari dan 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota Perhitungan realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

Nagari Mandiri Pangan di Kabupaten Lima tahun 2020

No	Nama Kelompok	Nagari	Kecamatan	Nagari Mandiri Pangan	Sumber Dana Tahun
1	Tegar Jaya	Tanjung gadang	Lareh Sago Halaban	Inti	APBN 2006
2	Kayuta Saiyo	Labuah Gunuang	Lareh sago Halaban	Inti	APBN 2009
3	Simpaty jaya	Sariak Laweh	Akabiluru	Inti	APBN 2006
4	Bina Usaha	Koto tengah Batu Hampa	Akabiluru	Inti	APBN 2009
5	Sejahtera	Taeh Baruah	Payakumbuh	Inti	APBN 2007
6	Boncah Suka Maju	Batu Balang	Harau	Inti	APBN 2009
7	Sarilamak Sejahtera	Sarilamak	Harau	Inti	APBN 2007
8	Mandiri Jaya	Pilubang	Harau	Inti	APBN 2009
9	Sakato Indah	Sei.Naniang	Bukik Barisan	Inti	APBN 2010
10	Pangkalan Maju	Pangkalan	Pangkalan	Inti	APBN 2012
11	Elok Basamo	Durian Tinggi	Kapur IX	Inti	APBN 2012
12	Saiyo Sakato	Bukik Sikumpa	Lareh Sago halaban	Inti	APBD 2018
13	Ngarai Indah	Tanjung Bungo	Suliki	Inti	APBD 2018